

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

(LKJiP)

TAHUN 2022



**DINAS SOSIAL
KOTA PASURUAN**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkat, rahmat dan hidayat-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2022 ini dapat disusun.

LKJIP Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2022 ini merupakan dokumen laporan evaluasi SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2022. Melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini akan diketahui sejauh mana tingkat keberhasilan atau kegagalan terhadap pelaksanaan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2022 dan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif dalam melihat capaian keberhasilan sekaligus kendala/permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial Kota Pasuruan

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2022, semoga bermanfaat untuk pihak-pihak yang berkepentingan dan Allah SWT meridhoi segala upaya yang dilakukan segenap pelaku pembangunan di Dinas Sosial Kota Pasuruan untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan, berwawasan kebangsaan dan religious.

Pasuruan, 28 Februari 2023

KEPALA DINAS SOSIAL

KOTA PASURUAN



KOKOH ARIE HIDAYAT, SE.S.Sos, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19760919 199602 1 003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Untuk mewujudkan *good governance* dan terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, dan bebas KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) diperlukan sistem akuntabilitas pada seluruh jajaran aparatur negara.

Dinas Sosial Kota Pasuruan sesuai Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial adalah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam melaksanakan urusan Kesejahteraan sosial.

Untuk dapat melihat tingkat keberhasilan Dinas Sosial Kota Pasuruan, maka perlu dibuat pengukuran kinerja melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022. Pengukuran kinerja diukur berdasarkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang tertera pada Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2021-2026

Tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kota Pasuruan dituangkan dalam 6 program, 14 kegiatan dan 38 subkegiatan. Dari capaian terhadap tujuan dan sasaran tersebut, secara umum menunjukkan tingkat keberhasilan dengan rata-rata berhasil. Setelah dilakukan analisis maka didapatkan bahwa secara umum menunjukkan suatu keberhasilan. Adapun Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Sosial yaitu persentase PPKS yang terakses layanan sosial dasar dengan target tahun 2022 sebesar 90% dan realisasi mencapai 98,2%. Dapat disimpulkan dari capaian yang diperoleh telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

Pencapaian tersebut telah sesuai dengan yang diharapkan dan direncanakan. Banyak faktor yang mempengaruhi / menghambat pencapaian sasaran tersebut antara lain :

- 1 Ketersediaan dana, sumber daya manusia yang terpenuhi kuantitas dan kualitasnya.
- 2 Pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan serta terfasilitasinya kegiatan yang berhubungan dengan PSKS dan proses koordinasi serta komunikasi yang baik antara PSKS dan Dinas Sosial.

Upaya yang dilakukan antara lain :

- 1 Berusaha lebih menjangkau PPKS yang membutuhkan layanan
- 2 Menjalin komunikasi dan hubungan kerjasama yang lebih baik dengan pilar-pilar Dinas Sosial

Untuk masa mendatang, hasil evaluasi dan analisis diatas akan dijadikan masukan agar pencapaian sasarannya tetap sesuai dengan yang diharapkan.

Beberapa prinsip penyusunan dan penyajian laporan telah disajikan dengan berbagai pertimbangan. Prinsip-prinsip pelaporan yang baik mungkin saja tidak semua dapat diterapkan pada Laporan Kinerja ini, namun demikian laporan ini masih memenuhi tujuan penyusunannya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Penjelasan Umum Organisasi	1
1.2.1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	1
1.2.2. Anggaran	1
1.3. Dasar Hukum	2
1.4. Sistematika Laporan Kinerja	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	4
2.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	4
2.2. Rencana Kinerja Tahun 2022	7
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	10
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	10
1.3.1. Skala Capaian Kinerja	1
1.3.2. Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan	1
1.3.3. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	1
1.3.4. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	1
1.3.5. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional	1
1.3.6. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	1
1.3.7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	1

1.3.8. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	1
3.2. Realisasi Anggaran.....	15
BAB IV PENUTUP	19
LAMPIRAN	19

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun 2021 dan Tahun 2022	3
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja	8
Tabel 2.2 IKU Tahun 2022	9
Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2022 Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan	9
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan Tahun 2022	10
Tabel 2.5 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan Tahun 2022.....	11
Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja	15
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2022	16
Tabel 3.2.1 Tabel Pengukuran Kinerja Sasaran 1	17
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja	19
Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	19
Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan Stadar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota	20
Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi	21
Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran	22
Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan	23
Tabel 3.9 Anggaran Program dan Kegiatan Capaian.....	26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan	2
---	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan di Indonesia pada prinsipnya adalah merupakan rangkaian upaya untuk merealisasikan amanat konstitusi. Yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembangunan tersebut hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya. antara lain meliputi pembangunan fisik / radikal dan mental / batinia untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan, baik secara perorangan, keluarga maupun kelompok masyarakat secara bermartabat dengan menempatkan mereka sebagai pelaku pembangunan.

Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna. Oleh karena itu untuk mengetahui apakah pembangunan itu telah berjalan sesuai dengan yang diinginkan maka perlu kiranya di buatkan suatu laporan yang berisi tentang hasil kegiatan pembangunan dan evaluasinya agar dapat diketahui keberhasilannya ataupun kekurangannya. Dengan harapan kedepannya dapat dilakukan peningkatan-peningkatan dan perbaikan-perbaikan.

1.2. Penjelasan Umum Organisasi

1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Walikota Pasuruan No 11 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial adalah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam melaksanakan urusan kesejahteraan sosial. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Sosial Kota Pasuruan mempunyai fungsi :

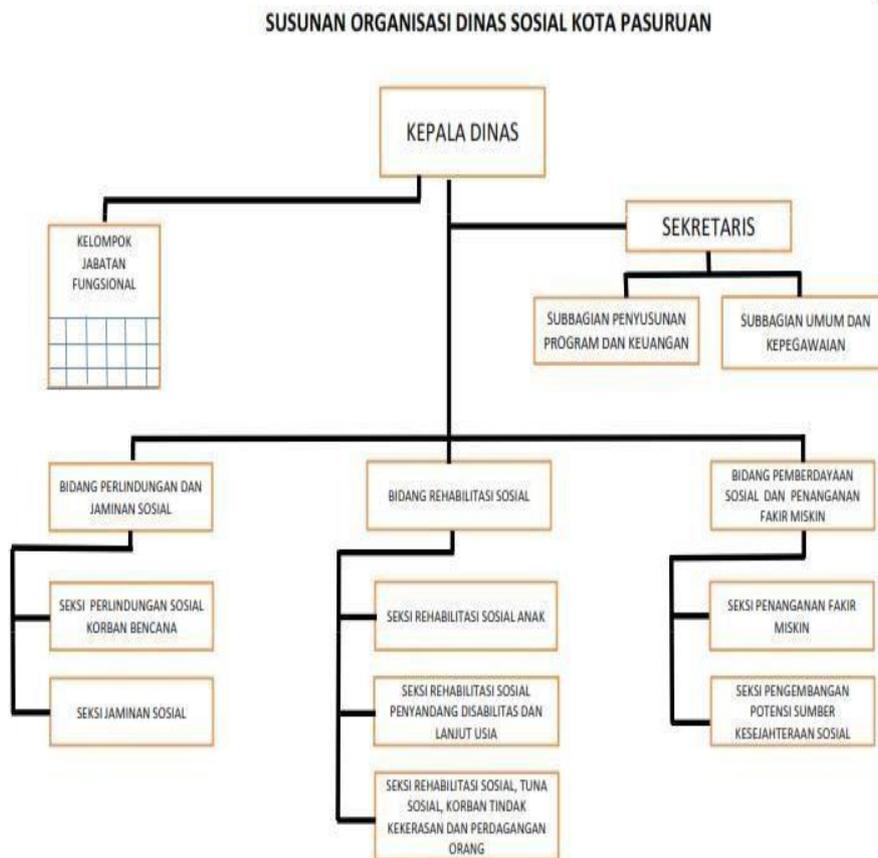
1. Penyusunan perencanaan bidang perlindungan, jaminan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial serta penanganan fakir miskin;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan, jaminan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial serta penanganan fakir miskin;
3. Pelaksanaan kebijakant eknis bidang perlindungan, jaminan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial serta penanganan fakir miskin;
4. Pelaksanaan Pelayanan bidang perlindungan, jaminan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial serta penanganan fakir miskin;
5. Pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi pelaksanaan urusan bidang perlindungan, jaminan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial serta penanganan fakir miskin;

6. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan perlindungan, jaminan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial serta penanganan fakir miskin;
7. Pelaksanaan kegiatan peñatausahaan Dinas Sosial.

Berikut bagan struktur organisasi yang tertera pada Susunan Organisasi Dinas Sosial Kota Pasuruan:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Pasuruan

LAMPIRAN VIII
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 50 TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA PERANGKAT DAERAH



1.2.2 Anggaran

Besaran anggaran yang dimiliki Dinas Sosial sesuai dengan usulan masyarakat melalui musrenbang serta menyesuaikan kebutuhan dinas. Sumber anggaran berasal dari APBD yang ter tuang pada DPPA tahun 2022.

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun 2021 dan Tahun 2022

Sumber	Tahun	Jumlah
(1)	(2)	(3)
APBD	2021	Rp. 23.515.822.097
APBD	2022	Rp. 28.155.762.151

Sumber : Dokumen DPPA tahun 2021 dan 2022

1.2.3 Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Pasuruan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam peningkatan pelayanan yang optimal di bidang sosial, karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat Kota Pasuruan di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis yang berkaitan dengan Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

- i. Bidang Rehabilitasi Sosial
 - a. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Balita dan anak
 - b. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penduduk Rentan dan Termarjinalkan (Kelompok usia produktif dengan resiko tertentu)
 - c. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia
 - d. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Orang dengan Disabilitas (ODD)
- ii. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) terdiri dari :
 - a. Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk membangun keluarga produktif
 - b. Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera (KSKS)
 - c. Program Keluarga Harapan (PKH)
- iii. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
 - a. Fasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial.
 - b. Peningkatan Kesejahteraan Sosial masyarakat.
 - c. Pembinaan Karang Taruna dan Karang Wherda.
 - d. SK/PSM sudah ada disetiap kecamatan/kelurahan namun belum optimal bersinergi dan belum terpadu melaksanakan kegiatan.

1.3. Dasar Hukum

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2022 disusun beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Intruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Walikota Pasuruan No 50 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah;
11. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan fungsi Dinas Sosial.

1.4. Sistematika Laporan Kinerja

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2022 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

BAB I	Pendahuluan Menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas pokok dan fungsi, Isu Strategis pada Dinas Sosial Kota Pasuruan, dan sistematika penyajiannya.
BAB II	Perencanaan Kinerja Memuat Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Perubahan Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2022.
BAB III	Akuntabilitas Kinerja Berisi penjelasan singkat tentang Capaian Target Sasaran Strategis tahun 2022, juga evaluasi dan analisis capaian kinerja tahun 2022 yang diuraikan per sasaran strategis dan akuntabilitas anggaran, dan membandingkannya dengan tahun sebelumnya.
BAB IV	Penutup Berisi kesimpulan terkait pencapaian kinerja dan pemanfaatannya untuk umpan balik bagi perencanaan pembangunan daerah pada tahun berikutnya.
LAMPIRAN	1.PK (Perjanjian Kinerja) 2022

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Pasuruan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabarandari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam halini Dinas Sosial Kota Pasuruan. Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Pasuruan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021-2026 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Pasuruan Nomor :188/79/423.105/2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Pasuruan PerubahanTahun 2021-2026. Penetapan jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Walikota terkait dengan penetapan//kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Pasuruan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Sosial Kota Pasuruan tersebutditujukan untuk mewujudkanvisi dan misi Kepala Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pasuruan Tahun 2021-2026. Disamping itu pula, Renstra Dinas Sosial Kota Pasuruan diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi dengan Renstra Kementerian Sosial RI, Bappenas dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur sebagai suatu system perencanaan pembangunan nasional.

Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Pasuruan telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Pasuruan dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum PD, sehingga Renstra Dinas Sosial Kota Pasuruan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Sosial Kota Pasuruan dan stakeholders.

Selanjutnya Renstra Dinas Sosial Kota Pasuruan tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Pasuruan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Sosial Kota Pasuruan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Walikota dan Wakil Walikota beserta segenap aparatur sebagai pelaksana dan penyelenggara

pembangunan di Kota Pasuruan. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Pasuruan dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi harus mampu di bangun menuju **PASURUAN KOTA MADINAH “ Maju Ekonominya, Indah Kotanya, Harmonis Warganya “**

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Walikota Pasuruan Tahun 2021-2026 yang berkaitan dengan Dinas Sosial adalah Misi I dan Misi III, yaitu :

Misi I : *Mempercepat Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Untuk Membuka Lapangan Kerja dan Pengurangan Kemiskinan.*

Misi III: *Memantapkan Kehidupan Masyarakat Multikultural Yang Harmonis Dengan Modal Sosial Yang Tangguh, Pendidikan dan Kesehatan Berkualitas dan Penanganan Covid-19 yang Tangkas.*

Misi Dinas Sosial yang mendukung capaian Visi Walikota Pasuruan adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat penyandang masalah sosial;
- b. Terwujudnya peningkatan dan perluasan pembangunan kesejahteraan sosial oleh pemerintah dan masyarakat.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang hendak dicapai dari Visi dan Misi di atas adalah :

- Meningkatkan kemandirian pemerlu pelayanan sosial dasar (PPKS)

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi sosial. Idealnya sasaran dapat dijabarkan secara kuantitatif sehingga dapat diukur pencapaiannya. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif dan efisien.

Sasaran Dinas Sosial Kota Pasuruan selama 5 tahun ke depan adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan layanan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS);

Tujuan dan Sasaran pada Dinas Sosial di atas sudah mengalami perubahan yang didasarkan oleh rekomendasi nara sumber Kemenpan RB, Tim SAKIP Kota dan Bapelitbangda Kota Pasuruan.

Tujuan, sasaran dan indikator kinerja dan Target Kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1. Tabel Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kerja	Target Kinerja				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya kemandirian Pemerlu Pelayanan Sosial Dasar (PPKS)		Presentase Peningkatan PPKS prioritas yang mandiri memenuhi kebutuhan sosial dasarnya	5%	5%	5%	5%	5%
		Meningkatnya Layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Presentase PPKS Yang Terakses Layanan Sosial Dasar	90%	92%	95%	97%	99%

Sumber : RENSTRA Dinas Sosial Kota Pasuruan Periode 2021-2026

Dinas Sosial Kota Pasuruan dalam merencanakan program, kegiatan, dan indikator kinerja mengacu pada Indikator Kinerja Utama dalam Renstra Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2021- 2026. Indikator Kinerja Utama merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Pasuruan yang berisi indikator kinerja tahunan untuk kurun waktu 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari target kinerja RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026.

Berikut adalah Formula IKU Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2022:

Tabel 2.2.

Tabel Indikator Kinerja Utama Perangkat DAERAH Tahun 2022:

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formula		
				Definisi Operasional	Formulasi / Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Layanan Pemerlu Pelayanan Sosial Dasar (PPKS)	Presentase PPKS yang terakses layanan sosial dasar	%	Mengukur PPKS yang terakses layanan sosial dasar, sehingga permasalahan-permasalahan kesejahteraan sosial dapat tertangani dengan baik.	$\frac{\text{Jumlah sasaran PPKS yang terakses layanan sosial dasar}}{\text{Jumlah Total PPKS}} \times 100\%$	a. Bidang Pemberdayaan Sosial b. Bidang Rehabilitasi Sosial c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Sumber : Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Pasuruan 2022

2.2. Rencana Kinerja Tahun 2022

Tujuan dan Sasaran beserta indikator selaras dengan Renja PD yang dituangkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3. Rencana Kinerja Tahun 2022 Dinas Sosial Kota Pasuruan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kemandirian Pemerlu Pelayanan Sosial Dasar (PPKS)		Presentase PPKS prioritas yang mandiri memenuhi kebutuhan sosial dasarnya	%	5
		1.1	Meningkatnya Layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	90

Sumber : Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Pasuruan 2022

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja / perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen perjanjian kinerja tahun 2022 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai selama tahun 2022

Sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Target kinerja pada tingkat Sasaran Strategis akan menjadi tolak ukur tabel dibawah ini :

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2022

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya Layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%PPKS yang terakses layanan sosial dasar	90 %

Sumber :Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2022

PROGRAM

1. Program Pemberdayaan Sosial
2. Pogram Rehabilitasi Sosial
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
4. Penanganan Bencana
5. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota

ANGGARAN

- Rp. 21.395.652.799,00
- Rp. 1.584.364.538,00
- Rp. 910.160.954,00
- Rp. 137.134.680,00
- Rp. 27.982.480,00

Anggaran Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan berdasarkan DPA 2022 Dinas Sosial dijelaskan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.5. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2022

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja
1	2	3
Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar		
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial		
DINAS TENAGA KERJA		
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Bantuan Sosial yang tersalurkan	100%
	Persentase PSKS yang Aktif	82%
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang meningkat kapasitasnya	100%
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	121 Orang
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Keluarga Yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	4.851 Orang
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Lembaga
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang direhabilitasi sesuai tahun dasar	9,2%
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, LanjutUsia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan Layanan Sosial	80%
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	220 Orang
	Lansia Terlantar yang mendapat bantuan sosial santunan	110 Orang
	Orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga anak/balita terlantar	10 Orang
	Orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga Anjal	11 anak
	Orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga Gelandangan	6 Orang
	Orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga pengemis	76 Orang

LKjIP DINAS SOSIAL KOTA PASURUAN 2022

	Orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga T4	6 Orang
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang
	Klien yang mendapatkan akses layanan kesehatan	10 Anak
	Klien yang mendapatkan akses layanan pendidikan	30 Anak
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial P	Persentase PPKS yang mendapatkan Layanan Sosial	100%
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah orang yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	26 Orang
	Jenis PMKS yang terdata	26 Orang
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah orang yang mendapatkan Alat Bantu, dan Alat Bantu Peraga sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Item
	Belanja Pelayanan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas	5 Item
	Alat Bantu (Kursi Roda, Kaki Palsu, Tangan Palsu, serta Alat Bantu Lainnya	6 Unit
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	1.303 Orang
	PPKS yang mendapatkan bantuan sosial	493 Orang
	PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial	125 Orang
	PPKS yang mendapatkan pembinaan	104 Orang
	PPKS yang mengikuti lomba (HALUN dan Jambore ODGJ)	581 Orang
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Anak
	Klien yang mendapatkan akses layanan kesehatan	10 Anak
	Klien yang mendapat akses layanan pendidikan	30 Anak
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase DTKS yang di update	2%
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota	Persentase DTKS yang di update	2,9%
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota	Jumlah Keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin Kabupaten/Kota	3.000 Ruta
	Jumlah kegiatan verifikasi dan validasi data data Kemiskinan/SIKS NG	1.000 KK
	Jumlah kegiatan verifikasi dan validasi data PBI KN dan PBI Daerah	12.000 Jiwa
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Item
	Lembaga yang mendapatkan bantuan Hibah	3 Lembaga
	Jumlah Pemulangan Orang Terlantar	50 Orang

	Penerima Bansos Anggota LVRI	86 Orang
	Hewan Kurban yang dibagikan	72 Ekor
	Penerima Santunan Kematian	500 Orang
	JuruKunci yang disantuni	45 Orang
	Peserta PKH yang tergraduasi	1.020 KPM
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang tertangani	54,6%
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kab/Kota	Persentase korban yang tertangani	2%
Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000 Jiwa
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Kecamatan
Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang
Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kab/Kota	Jumlah Rapat Koordinasi anggota Taruna Siaga Bencana kegiatan pemberdayaanmasyarakatterhadapkesiapsiagaanbencana	90%
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	61 Orang
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase cakupan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	1,81%
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	100%
	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaanya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1.000 m2

Sumber :Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Tahun 2022

Kegiatan / Sub Kegiatan		Anggaran
1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 21.395.652.799
1.1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kab/Kota	Rp. 36.0509.030
1.2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan	Rp. 35.769.350

		Kab/Kota		
	1.3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kab/Kota		Rp. 20.115.766.849
	1.4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kab/Kota		Rp. 883.607.570
2		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, LanjutUsia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di LuarPantiSosial		Rp. 184.469.990
	2.1	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Rp. 132.944.490
	2.2	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Rp. 51.525.500
3		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di LuarPanti Sosial		Rp. 1.399.894.548
	3.1	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		Rp. 31.086.230
	3.2	Penyediaan Alat Bantu		Rp. 45.843.800
	3.3	Pemberian BimbinganFisik, Mental, Spiritual dan Sosial		Rp. 1.199.751.400
	3.4	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Rp. 123.213.118
4		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota		Rp. 910.960.954
	4.1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota		Rp. 239.948.300
	4.2	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Rp. 670.212.654
5		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kab/Kota		Rp. 62.408.600
	5.1	Penyediaan Makanan		Rp. 42.966.000
	5.2	Penyediaan Sandang		Rp. 4.478.100
	5.3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi		Rp. 3.231.000
	5.4	Penanganan Khusus Bagi KelompokRentan		Rp. 3.054.000
	5.5	Pelayanan Dukungan Psikososial		Rp. 8.679.500
6		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kab/Kota		Rp. 74.726.080
	6.1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		Rp. 74.726.080
7		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Rp. 27.982.480

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1 Skala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori / Interpretasi	Rata – Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber :Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

3.1.2 Membandingkan Antara Target dan Realisasi Tahun Pelaporan

Kinerja Dinas Sosial Kota Pasuruan diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator sasaran serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program / kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program / Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran.

Pencapaian IKU Dinas Sosial Kota Pasuruan secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini :

Tabel 3.2Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No.	SasaranStrategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2022			Sumber Data
				Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	
1	Meningkatnya Layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%PPKS yang terakses layanan sosial dasar	%	90	98,2	109	Bidang Pemberdayaan Sosial Bidang Rehabilitasi Sosial Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial

Sumber :LKPJ Tahun 2022

Dari tabel tersebut diatas, faktor pendukung dan faktor penghambat terhadap keberhasilan capaian kinerja serta rencana aksi akan dijelaskan pada masing masing IKU pada halaman berikutnya.

Tahapan akuntabilitas kinerja berikutnya yaitu pengukuran, evaluasi dan analisis kinerja sasaran strategis. Pengukuran kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas.

Sedangkan Evaluasi bertujuan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala-kendala yang dijumpai didalam pelaksanaan kegiatan – kegiatan dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program / kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu dalam evaluasi kinerja juga dilakukan analisis kinerja dengan cara membandingkan antara outputs dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi antara nilai input dengan output.

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah dikemukakan diatas, penjelasan tentang analisis capaian kinerja pada Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Tujuan “Meningkatnya kemandirian pemerlu Pelayanan Sosial Dasar (PPKS)”
 - 1.1. Sasaran 1 : Meningkatkan layanan pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS):

Tabel 3.2.1

Tabel Pengukuran Kinerja Sasaran 1 :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Presentase PPKS yang terakses layanan sosial dasar	90%	98,2%	109 %

Tabel diatas menunjukkan capaian kinerja sasaran sebesar 109 %. (dalam katagori AA / Sangat Memuaskan)

Faktor pendukung dari pencapaian ini karena didukung oleh jalannya koordinasi dan konsultasi antara pilar-pilar sosial dengan Dinas Sosial Kota Pasuruan.

Mengacu pada tingkat keberhasilan capaian kinerja beserta faktor pendukung dan penghambatnya, Dinas Sosial akan menyusun rencana aksi untuk tahun anggaran 2023 yaitu :

1. Memperbaiki Program Perlindungan Sosial Dengan Perubahan Strategi Penyaluran Bantuan Sosial Terpadu Berbasis
2. Melakukan Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dengan Peningkatan Kapasitan KUBE Di Setiap Kelurahan
3. Melanjutkan Kegiatan Verifikasi dan Validasi Data KPM Penerima Bantuan Sosial Untuk Menjamin Ketepatan Sasaran
4. Pemberian Bantuan sosial kepada anak yatim, anak yatim covid-19, lansia potensial, penyandang cacat, dhuafa, WRSE, Lansia terlantar dan pemberian Alat Bantu
5. Melaksanakan penyaluran hewan kurban sesuai dengan jadwal penyaluran
6. Melaksanakan verifikasi dan validasi data PBI untuk mendapatkan data yg akurat
7. Melaksanakan verifikasi dan validasi data DTKS sebagai upaya mendapatkan data akurat dan ter update

Untuk mendukung keberhasilan kinerja sasaran ini, Dinas Sosial melaksanakan program dan beberapa kegiatan. Diantaranya adalah :

1. Program Rehabilitasi Sosial, Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, LanjutUsia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan NAPZA di LuarPanti Sosial
2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
3. Program PemberdayaanSosial, Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteran Sosial Daerah Kabupaten/Kota

4. Program Penanganan Bencana, Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial dan Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Kabupaten/Kota
5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan, Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan.

Tingkat keberhasilan yang dicapainya antara lain perantara Tenaga Kerja Sosial Masyarakat (TKSM). Hambatan yang ditemui dalam pencapaian sasaran ini adalah belum ada tenaga operator data khusus PMKS, mengingat data PMKS setiap bulannya senantiasa mengalami perubahan seiring kondisi pada sasaran kegiatan.

3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi masing – masing indikator kinerja sasaran.

Rincian tingkat capaian kinerja masing – masing indicator kegiatan tersebut dapat diilustrasikan dalam bentuk tabel di bawah :

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja

No.	SasaranStrategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi		
				2020	2021	Tahun n
1	Meningkatnya Layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	% PPKS yang terakses layanan sosial dasar	90	3,97	57,05	98,2

Sumber :LkjIP 2020, 2021, dan LKPJ 2022

Rata-rata perbandingan realisasi capaian kinerja tahun sebelumnya sampai dengan realisasi tahun berjalan untuk Prosentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terlayani adalah 98,2 % data perbandingan tersebut mencerminkan bahwa untuk tingkat kemajuan Tahun 2022 adalah Baik

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen

Perbandingan realisas kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Sosial Kota Pasuruan periode 2021 – 2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya layanan pemerlu pelayanan Kesejahteraan sosial (PPKS)	%PPKS yang terakses layanan sosial dasar	98,2 %	99 %	100%

3.1.5 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Provinsi Jawa Timur

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan provinsi diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.5

Perbandingan Pencapaian dengan Standar Provinsi Jawa Timur

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Provinsi Jawa Timur	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	% PPKS yang terakses layanan sosial dasar	98,2%	0,13	1,32

Sumber : SAKIP DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022

Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terakses layanan sosial dasar Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2022 terealisasi sebesar 98,2% dengan cakupan diluar panti atau masyarakat. Sedangkan Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti pada Dinas Sosial Provinsi Tahun 2022 terealisasi sebesar 0,13.

Berdasarkan data *benchmark* di atas terdapat perbedaan cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terakses layanan sosial dasar antara Dinas Sosial Kota Pasuruan dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, bahwasanya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terakses layanan sosial dasar Dinas Sosial Kota Pasuruan yang mencakup diluar panti atau di masyarakat dengan sebanyak 20.429 KPM dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 17.654.523.994 sedangkan untuk Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur tersebut adalah sebanyak 627.738 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 70.061.854.430.

3.1.6 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada table berikut:

Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya layanan pemerlu pelayanan Kesejahteraan sosial (PPKS)	% PPKS yang terakses layanan sosial dasar	90 %	98,2 %	109%	Ketercapaian ini didukung oleh jalannya koordinasi dan konsultasi antara pilar-pilar sosial dengan Dinas Sosial Kota Pasuruan Serta ketersediaan dana maupun sumberdaya manusia yang terpenuhi kuantitas dan kualitasnya.	

Sumber : Monev 2022

3.1.7 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumberdaya disajikan pada table berikut:

Tabel 3.7

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran :

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	90	98,2	109	28.568.613.969	21.978.595.696	76,93	67,5

Sumber : LKPJ 2022

Analisis efisiensi pengguna sumber daya di Dinas Sosial Kota Pasuruan membandingkan antara ketercapaian target kinerja dengan anggaran yang digunakan. Pagu anggaran dan realisasi anggaran dikalkulasikan dan subkomponen-subkomponen yang menunjang indikator-indikator kinerja yang ada. Capaian indikator kinerja sebesar 109% dengan capaian realisasi anggaran sebesar 76,93%.

Upaya upaya efisiensi yang dilakukan untuk Dinas Sosial Kota Pasuruan terkait dengan anggran tersebut diatas melakukan verifikasi dan validasi data KPM (Keluarga Penerima Manfaat) penerima bantuan APBD. Sejumlah 4.587 KPM dengan hasil 2.095 KPM dinyatakan layak menerima bantuan. Adapun tujuan kegiatan verifikasi dan validasi untuk menjamin ketetapan penerima bantuan.

Dinas Sosial Kota Pasuruan juga mlakukan pengusulan KPM APBD untuk mendapatkan bantuan sosial dari APBN antara lain BPNT sebanyak 1.619 KPM dan PKH sebanyak 49 KPM. Berdasarkan data diatas Dinas Sosial Kota Pasuruan sudah cukup baik dalam penggunaan data.

3.1.6 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningktan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan disajikan pada table berikut:

3.1.8 Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja serta uraian penjelasan tabel di bawah ini :

Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya kemandirian pemerlu Pelayanan Sosial Dasar (PPKS)	Persentase peningkatan PPKS prioritas yang mandiri memenuhi kebutuhan sosial dasarnya	100%				Menunjang	
2	Meningkatnya layanan pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang terakses layanan sosial dasar	109 %			100%	Menunjang	
3				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang aktif	100%	Menunjang	

4				<i>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kab/Kota</i>	<i>Persentase PSKS yang meningkat kapasitasnya</i>	100%		
5				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang direhabilitasi sesuai tahun dasar	100%	Menunjang	
6				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, LanjutUsia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan Layanan Sosial	70,63%	Menunjang	
7				Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan Layanan Sosial	100%	Menunjang	
8				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase DTKS yang di update	100%	Menunjang	
9				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota	Persentase DTKS yang di update	100%	Menunjang	
10				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban bencana yang tertangani	-	Tidak Menunjang	
11				Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kab/Kota	Persentase Korban yang tertangani	-	Tidak Menunjang	
12				Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan	Jumlah Rapat Koordinasi	111%	Menunjang	

				Bencana Kab/Kota	anggotaTaruna Siaga Bencana kegiatan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana			
13				PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase cakupan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	110%	Menunjang	
14				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase cakupan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	100%	Menunjang	

Sumber : Monev 2022

Dari tabel diatas hamper seluruh program dan kegitan menunjang dan terlaksana sesuai dan melampaui target, namun terdapat satu program yang tidak memenuhi target yakni Program Penanganan Bencana di tahun 2022. Hal tersebut dikarenakan tidak ada Bencana yang terjadi pada Tahun 2022 di Kota Pasuruan.

3.2. Realisasi Anggaran

Dalam realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.9 Anggaran Program dan Kegiatan Capaian

Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya Layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Rp24.055.295.545	Rp17.713.282.070	73,64%
Program Pemberdayaan Sosial	Rp21.395.652.799	Rp15.586.151.464	72,85%
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp91-.160.954	Rp843.763.040	92,70%
Program Penanganan Bencana	Rp137.134.680	Rp58.758.076	42,85%
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp287.982.480	Rp20.215.254	72,24%

Sumber : Monev 2022

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kota Pasuruan ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2022. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik (AKIP) sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Sosial Kota Pasuruan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada Tahun 2022 Dinas Sosial Kota Pasuruan menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator sasaran. Secara rinci pencapaian kinerja Dinas Sosial Kota Pasuruan dapat ditunjukkan pada table dibawah ini :

No	Sasaran strategis	Jumlah indikator sasaran	Rata-rata capaian kinerja sasaran	Tingkat Pencapaian							
				Sangat berhasil		Berhasil		Cukup		Kurang	
				Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
MISI I dan III											
1	Meningkatnya Layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1 (satu) Sasaran : % PPKS yang terakses layanan sosialdasar	109	-	-	109	-	-	-	-	-

Dari tabel diatas bisadilihatbahwaada0 (Nihil) IndikatorSasaran yang masuk kategori “ Sangat Berhasil “, 1 (satu) indikatorSasaran masuk kategori“ **Berhasil** “,0 (Nihil) IndikatorSasaran masuk kategori“ Cukup “ dan 0 (Nihil)IndikatorSasaran masuk kategori ‘ Kurang “.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka ada beberapa saran atau upaya, yakni sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan serta anggaran dapat dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.
2. Penambahan anggaran untuk biaya sarana.

Berdasarkan penjelasan dari berbagai bab, maka Dinas Sosial Kota Pasuruan telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan visi dan misi Walikota Pasuruan dengan didasari oleh ketentuan peraturan yang berlaku. Namun demikian masih diperlukan hanya berbagai penyempurnaan serta peningkatan guna mengoptimalkan kinerja Dinas Sosial Kota Pasuruan.

Demikian yang dapat kami laporkan, untuk dapat dijadikan bahan kebijakan lebih lanjut.

Pasuruan, 28 Februari 2023

KEPALA DINAS SOSIAL

KOTA PASURUAN



KOKOH ARIE HIDAYAT, SE.S.Sos, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19760919 199602 1 003